

PERAN PENYULUH AGAMA DALAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN MAMUJU

Abd. Kadir

Peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72, Makassar
Email: kadirrahman1957@gmail.com

Abstrak

Suatu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, masyarakat yang mendiami Kabupaten Mamuju adalah masyarakat heterogen. Heterogenitas tersebut dapat dilihat dari aspek budaya, sosial ekonomi, maupun dari segi penganut agama. Keragaman penganut agama tersebut bisa berdampak positif, tapi bisa juga berdampak negatif yang mengakibatkan konflik yang sifatnya manifest dan laten.

Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengangkat penyuluh agama, yang salah satu tugas utamanya memberikan penyuluhan dan pemahaman agama, serta menjaga harmonisasi antar penganut agama. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menelusuri peran dan fungsi penyuluh agama dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dan penjarangan data dengan wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan, penyuluh agama PNS dan non PNS di Kabupaten Mamuju telah memainkan peran dalam terciptanya kerukunan umat beragama. Peran tersebut dilakukan melalui kegiatan di antaranya, pengajian terjadwal melalui khutbah Jum'at bagi penyuluh penyuluh agama Islam. Kemudian bagi penyuluh agama Kristen dan Katolik, pembinaan agama dilakukan di gereja. Selain itu ada pula diantaranya yang terlibat menjadi pengurus FKUB.

Kata kunci: Penyuluh agama, kerukunan, Kabupaten Mamuju

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal masyarakat majemuk, baik dari aspek suku bangsa, budaya, maupun aspek pemeluk agama. Dari kenyataan tersebut, Kementerian agama sebagai mandataris Negara dalam mengatur dan mengelola pembangunan manusia Indonesia melalui pembinaan keberagamaan di Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat sejahtera, cerdas, serta saling menghormati antar sesama pemeluk agama dalam wadah NKRI. Dari visi tersebut tergambar tugas kementerian agama sebagai pilar penjaga harmonisasi social masyarakat Indonesia

yang majemuk melalui pembinaan kerukunan umat beragama.

Berdasarkan visi kementerian Agama tersebut, maka model keberagamaan yang harus dikembangkan di Indonesia adalah model keagamaan yang progressif, yaitu model keberagamaan dengan nilai-nilai keagamaan yang bersifat profetik namun tidak mematikan potensi manusiawi dalam diri manusia untuk memperjuangkan sisi saling sublime dari humanisnya. Nilai-nilai agama tersebut harus menjadi faktor utama atas terbentuknya masyarakat yang memiliki visi kemanusiaan yang berorientasi ketuhanan.

Kegiatan kepenyuluhan yang berorientasi pada pelayanan pembinaan keagamaan bagi masyarakat seluas mungkin adalah upaya untuk mengejawantahkan kualitas pemahaman dan pengamalan agama bagi masyarakat melalui upaya pengembangan wawasan keagamaan, dan pengembangan pusat-pusat edukasi wawasan dan pengamalan keagamaan masyarakat melalui pembentukan kelompok-kelompok dampingan. Dalam konteks internal Kementerian Agama, kehadiran penyuluh agama dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat beragama, agar terwujud kehidupan masyarakat beragama di Indonesia yang sesuai dengan visi besar Kementerian Agama.

Arah kebijakan dan strategis nasional bidang agama 2015-2019 poin a1 dan poin b tentang peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama dan peningkatan kerukunan umat beragama. Tujuan bimbingan dan penyuluhan agama; menciptakan pribadi dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, toleran dan hidup rukun, berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Penyuluh agama merupakan ujung tombak kemeterian agama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan umat beragama demi peningkatan kualitas kehidupan keagamaan masyarakat. Selain itu, penyuluh agama berposisi sebagai garda terdepan dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama. Balai Litbang Agama sudah tiga kali melakukan penelitian terkait kepenyuluhan yaitu, tahun 2010 tentang ‘Penyelenggaraan Pelayanan Kepenyuluhan Agama’, dan tahun 2012 tentang ‘Pembinaan Muallaf di Kawasan Timur Indonesia. Hasil dari tiga penelitian tersebut menemukan bahwa model-model pembinaan yang diberikan masih cenderung bersifat

konvensional dan dengan muatan materi yang bersifat normative dan eskatologis. Pembinaan umat yang berkenaan dengan bagaimana membangun hubungan social yang harmonis dalam bingkai masyarakat multicultural dan multiagama masih kurang dieksplorasi.

Peran-peran penyuluh Kementerian Agama dalam hal pembinaan kerukunan umat beragama meski peran tersebut tidak masuk dalam regulasi tugas dan fungsi penyuluh agama. Namun, jika menilik pada kondisi social masyarakat Indonesia yang multicultural dan pentingnya pembinaan kerukunan umat beragama sebagai tugas besar Kementerian Agama dalam menjaga keutuhan NKRI, maka peran penyuluh agama dalam hal ini tidak bisa diabaikan. Oleh karena itulah, Balai Litbang Agama Makassar merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang Peran Penyuluh Agama dalam Pembinaan Kerukunan umat Beragama di Kawasan Timur Indonesia, termasuk di Kabupaten Mamuju.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan penelitian ini adalah ‘‘Bagaimana Peran Penyuluh Agama dalam meningkatkan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju? Selanjutnya, rumusan masalah tersebut diuraikan dalam tiga sub masalah penelitian, yaitu Bagaimana situasi hubungan antar umat beragama di Kabupaten Mamuju, pandangan penyuluh agama tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju, dan keterlibatan penyuluh agama di dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama.

Batasan Operasional Konsep

Penyuluh Agama

Penelitian ini memahami konsep penyuluh agama sebagaimana diatur dalam KMA Nomor 516 tahun 2003 tentang

“Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya. Tugas penyuluh agama adalah melakukan dan mengembangkan kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. Kegiatan kepenyuluhan adalah pertama, melakukan persiapan, meliputi: a) identifikasi potensi wilayah atau kelompok sasaran; b) menyusun rencana kerja; c) menyusun program kerja. Kedua, menyusun materi bimbingan baik secara tertulis (naskah, leaflet, slide, poster, booklet) atau rekaman (kaset, video). Ketiga, melaksanakan kegiatan pembimbingan dan penyuluhan (melalui tatap muka, melalui media, atau pentas pertunjukan) atau melakukan konsultasi keagamaan baik perorangan maupun kelompok. Keempat, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan.

Pembinaan umat beragama

Dalam penelitian ini, konsep mengenai pembinaan kerukunan umat beragama mengacu pada tri kerukunan umat beragama yang digagas oleh Prof Mukti Ali, yaitu kerukunan intern umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dan pemerintah.

TINJAUAN TEORITIS

Penyuluh Agama

Studi tentang kepenyuluhan ini dimaksudkan untuk melihat kembali keseluruhan proses penyelenggaraan kepenyuluhan agama yang dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya yang berada di tingkat Kabupaten/ kota sebagai bagian dari optimalisasi pembinaan kerukunan umat beragama.

Dalam himpunan peraturan tentang jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya pada pasal 1 disebutkan “

Penyuluh agama adalah suatu kegiatan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama untuk meningkatkan peran serta, masyarakat dalam pembangunan nasional”. Sedangkan menurut M Arifin, yang dimaksud dengan penyuluhan agama adalah “segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya supaya orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran atau penyerahan diri terhadap kekukasaan Tuhan YME.

Dalam himpunan peraturan tentang jabatan fungsional jabatan fungsional penyuluh agama dan angka kreditnya (Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000) dalam pasal 1 disebutkan “Penyuluh agama adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama. Pada prakteknya di lapangan, penyuluh agama bukan hanya mereka yang berstatus sebagai PNS, melainkan juga tokoh –tokoh agama yang diberikan SK oleh Kementerian Agama setempat sebagai penyuluh agama non PNS.

Kementerian Agama dan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama

Rukun, bisa berarti damai dan baik, sehingga kerukunan beragama ini dapat dikatakan sebagai hubungan yang damai dan baik antara pemeluk agama yang berbeda-beda. Menurut Hamdan, MM, Kerukunan beragama berarti hubungan sesama umat beragama dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pembinaan kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama setidaknya dapat dirumuskan dalam lima langkah strategis. *Pertama*, menumbuhkan dan mengembangkan situasi yang kondusif bagi terwujudnya kerukunan umat beragama (tri kerukunan). *Kedua*, pembinaan kerukunan umat beragama agar lebih harmonis dan lebih toleran melalui penguatan pemahaman, penghayatan, serta pengamalan agama yang bervisi rahmat, damai, atau kasih. *Ketiga*, mencegah agar tidak terjadi pertentangan maupun konflik atas nama agama termasuk diantaranya melakukan pencegahan terhadap upaya untuk membenturkan umat beragama dengan pemerintah. *Keempat*, menjadi mediator apabila terjadi pertentangan atau konflik yang membawa atau mengatas namakan wawasan multikulturalisme dan paradigma keberagamaan yang inklusif yang sejalan dengan prinsip "bhinneka Tunggal Ika".

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan, dan Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi masalah penelitian secara lebih mendetail dan mendalam melalui deskriptif yang bersifat kritis konstruktif.

Sebagai penelitian kualitatif, maka penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu, wawancara mendalam, observasi lapangan, dan pemanfaatan dokumen tertulis. Untuk melengkapi dan sekaligus mengkonfirmasi data yang didapatkan juga menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) sebagai salah satu kiat untuk memperoleh data valid.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah, penyuluh agama, di antaranya, Namru Asdar, Nurhaedah, Nurjannah, ketiganya penyuluh agama islam. Anton penyuluh Katolik, dan Pendeta Amstrong Penyuluh Agama Kristen. Pejabat terkait di lingkungan Kementerian agama, di antaranya, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Mamuju, Adnan Nota, dan Ka SubBag Tata Usaha Kantor Kemenag Kabupaten Mamuju, Adhar.

Analisis data dilakukan dengan metode analisis deskriptif tapi kritis. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen-dokumen, dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Geografi dan Monografi

Melacak data sejarah sebelum terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Mamuju merupakan bahagian dari Provinsi Sulawesi Selatan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan (Faisal, 2013:53). Setelah semangat reformasi melanda masyarakat Indonesia beberapa waktu yang lalu, maka pada tahun 2004 yang lalu masyarakat Kabupaten Mamuju bersama masyarakat diempat kabupaten lainnya menggagas pembentukan satu provinsi tersendiri berpisah dari Provinsi Sulawesi Selatan. Gagasan tersebut resmi terealisasi pada tanggal 5 Oktober dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Undang- Undang No 26 tahun 2004, dan merupakan provinsi ke 33 (Safrillah dan Idham, 2010:182, Muis, 2004:2). Selain Kabupaten Mamuju, kabupaten lainnya yang termasuk dalam Provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Polman, Kabupaten

Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara. Kemudian pada tanggal 19 Nopember 2004, Kabupaten Mamuju ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat.

Luas wilayah Kabupaten Mamuju sebanyak 5.056,19 Km², yang terbagi atas sebelas kecamatan, terdiri atas 88 desa, 11 kelurahan. Sebelas kecamatan tersebut mempunyai luas wilayah yang bervariasi. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah, Kecamatan Kalumpang dengan luas wilayah 1.731,99 Km² atau 21,81 % dari seluruh wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan kecamatan yang paling sempit wilayahnya adalah Kecamatan Balabalakang, yang memiliki luas wilayah hanya 21,86 Km² (0,28%).

Berdasarkan hasil survey penduduk antar sensus (Supas), jumlah penduduk Kabupaten Mamuju tahun 2013 sebanyak 252.295 jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 128.704 jiwa, dan perempuan sebanyak 123.591 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar pada 11 kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, dengan jumlah yang bervariasi pada setiap kecamatan. Ada tiga kecamatan yang paling banyak jumlah penduduknya, dengan jumlah penduduk di atas dua puluh lima ribu jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Mamuju dengan jumlah penduduk 61.694 jiwa (16,35%) dari jumlah penduduk Kabupaten Mamuju. Kemudian kecamatan paling sedikit jumlah penduduknya adalah Kecamatan Balabalakang, dengan jumlah penduduk 2.508 jiwa (0,69%).

Penduduk Kabupaten Mamuju mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni rata-rata 3,5 % pertahun. Sebagai gambaran jumlah penduduk pada tahun 2009 sebanyak 211.788 jiwa, kemudian

pada tahun 2010 jumlah penduduk bertambah menjadi 231.324 jiwa, dan pada tahun 2011 menjadi 234.972 jiwa, pada tahun 2012, jumlah penduduk mencapai 346.442 jiwa, dan pada tahun 2013 berjumlah 252.295.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju tersebut, bukan disebabkan oleh factor fertilitas atau kelahiran semata, tapi juga disebabkan oleh inmigrasi kedalam yakni banyaknya penduduk dari daerah lainnya yang datang ke Mamuju untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

Ada beberapa faktor yang menarik orang lain mendatangi Kabupaten Mamuju, di antaranya kekayaan sumber daya alamnya yang cukup potensial untuk menjadi lahan ekonomi. Misalnya dari hasil perkebunan yang menghasilkan coklat dan kelapa sawit. Kemudian dari segi pertambangan, menurut hasil survey bahwa Kabupaten Mamuju mengandung potensi alam yang cukup menjanjikan seperti, emas, batu bara, marmer dan minyak. Faktor lainnya adalah sebagai provinsi yang baru terbentuk dan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai ibukota provinsi, dengan sendirinya membutuhkan banyak tenaga untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Sehingga Kabupaten Mamuju dihuni oleh penduduk yang heterogen dari suku bangsa. Selain etnis mandar yang merupakan penduduk asli, juga dihuni oleh etnis pendatang, seperti Bugis, Makassar, Jawa, dan lain-lain.

Peta Penganut Agama di Kabupaten Mamuju

Pemerintah Indonesia secara yuridis mengakui enam agama di Indonesia, namun di Kabupaten Mamuju, sampai saat ini baru lima agama yang memiliki penganut. Dari kelima agama tersebut, penganut agama Islam, yang merupakan mayoritas dari segi

jumlah penganut, yakni sebanyak 221.885 jiwa (87,94%). Penganut agama terbanyak kedua adalah Kristen, sebanyak 32.121 jiwa (12,73%) ketiga agama Katolik, sebanyak 9.165 jiwa (3,63%) kemudian Hindu sebanyak 5438 jiwa (2,15%), dan Buddha sebanyak 85 jiwa (2,15%).

Dari lima agama tersebut di atas, hanya penganut agama Islam yang tersebar secara merata di sebelas kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamuju, sedangkan empat penganut agama lainnya, penganutnya tidak tersebar secara merata pada semua kecamatan yang ada. Sebagai gambaran penganut agama Kristen hanya terdapat di empat belas kecamatan, dan satu-satunya kecamatan yang tidak ada penganut agama Kristen adalah Kecamatan Tapalang Barat. Kemudian penganut agama Katolik terdapat di sebelas kecamatan. Adapun kecamatan yang tidak terdapat penganut agama Katolik adalah Kecamatan Tapalang; Kecamatan Kalukku; Kecamatan Tapalang Barat; dan Kecamatan Simboro Kepulauan.

Penganut agama lainnya yang tidak tersebar secara merata pada seluruh kecamatan yang ada dalam wilayah Kabupaten Mamuju adalah penganut agama Hindu dan agama Budha. Penganut agama Hindu hanya tersebar pada delapan kecamatan yakni, Kecamatan mamuju, Kecamatan Papalang, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Bonehau. Adapun penganut agama Buddha hanya tersebar pada tujuh kecamatan yakni, Kecamatan Mamuju, Kecamatan Sampaga, Kecamatan Pangale, kecamatan Tommo, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Karossa.

Bagi penganut agama Islam, sarana ibadah tersedia sebanyak 803 buah, dengan rincian 604 buah berupa masjid, dan 197 buah berupa mushallah. Kemudian untuk penganut agama Kristen sebanyak 258 buah, dan Katolik tersedia sarana ibadah berupa gereja sebanyak 35 buah. Sedangkan bagi penganut agama Hindu dan Buddha sarana ibadahnya tersedia 31 pura bagi penganut agama Hindu, dan 18 buah bagi penganut agama Buddha.

Gambaran Kerukunan Antarumat Beragama

Dalam uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa penduduk Kabupaten Mamuju yang heterogen, baik dari segi suku bangsa, agama, maupun sosial ekonominya. Dari segi suku bangsa, selain suku bangsa Mandar yang menjadi penduduk asli, juga terdapat suku bangsa pendatang, di antaranya suku bangsa Bugis, Makassar, Jawa, Toraja, Nusa Tenggara Barat, dan lain-lain. Sehingga Kabupaten Mamuju dapat disebut sebagai Indonesia mini. Terjadinya in migrasi penduduk pendatang dari luar, massif terjadi setelah terbentuknya Sulawesi barat menjadi provinsi tersendiri, terpisah dari provinsi Sulawesi Selatan, dan menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai ibu kota provinsi.

Selain heterogen dari suku bangsa, penganut agama pun juga bervariasi. Menurut data pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju, ada lima agama yang berkembang, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dari lima agama tersebut, penganut agama Islam merupakan mayoritas, dan tersebar pada semua kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Sedangkan penganut agama lainnya tidak tersebar merata pada semua kecamatan yang ada. Misalnya penganut agama Kristen hanya tersebar pada 9 kecamatan, penganut agama Katolik 7 kecamatan, Hindu 3

kecamatan, yakni Kecamatan Mamuju, Kecamatan Papalang, dan Kecamatan Tommo. Sedangkan penganut Buddha hanya terdapat di Kecamatan Mamuju.

Meskipun penduduk Kabupaten Mamuju berasal dari latar belakang suku bangsa, dan agama yang berbeda bervariasi, namun tidak pernah terjadi konflik penduduk yang dilatari masalah SARA. Hubungan antar penganut agama terjalin dengan baik, seperti yang dikemukakan oleh Anton sebagai berikut: “....saya sebagai penyuluh agama Katolik di Kabupaten Mamuju ini sangat senang dengan adanya penduduk yang heterogen, dan saya kurang lebih sudah Sembilan tahun di Kabupaten Mamuju ini, relasi antara pemeluk agama baik adanya, tidak ada konflik yang timbul (Wawancara Anton, Penyuluh Agama Katolik di Mamuju, 3 Oktober 2015).

Fenomena kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju terlihat dengan jelas bagaimana penganut agama yang berbeda hidup bertetangga dalam satu lingkungan pemukiman, tidak terjadi segregasi pemukiman penduduk. Ketika salah satu penganut agama merayakan hari besar islam, misalnya penganut agama islam merayakan hari raya Idul Fitri, maka penganut agama lainnya melakukan kunjungan silaturahmi.

Anton, Penyuluh Agama Katolik mengemukakan; “Kalau kita adakan Paskah di sini kita undang tokoh–tokoh agama lain. Dan, kalau acara keagamaan Islam misalnya Idul Fitri, kami pejabat gereja mengunjungi bupati, dan pejabat lainnya yang beragama Islam.”

Hasil penelitian tahun 2013 yang lalu tentang indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju menunjukkan tingkat kerukunan yang baik dengan nilai Indeks 3,03

(Kadir, 2013:32). Ada empat variabel yang dipakai mengukur indeks kerukunan tersebut yakni, 1) Hubungan Sosial (menerima perbedaan untuk hidup damai dan merubah keseragaman menjadi perbedaan ingin tahu, menghargai dan belajar dari orang yang berbeda; 2) menerima bahwa yang lain memiliki hak; 3) Dukungan penuh terhadap perbedaan melalui kebijakan pemerintah; dan 4) Kearifan local dan peran organisasi masyarakat.

Dari empat variabel yang dipakai mengukur indeks kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju, kearifan local dan peran organisasi masyarakat menempati nilai indeks tertinggi. Hal ini mengindikasikan Kearifan local dan peran organisasi masyarakat masih sangat fungsional dalam menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju, terbukti belum pernah terjadi konflik yang berlatar belakang SARA, meskipun beberapa tahun yang lalu terjadi konflik antar umat beragama di daerah Mambi Kabupaten Polman, dan Kabupaten Poso Sulawesi Tengah, yang secara geografis berdekatan dengan Kabupaten Mamuju. Namun, konflik di dua daerah tersebut tidak berpengaruh di Kabupaten Mamuju.

Ada beberapa kearifan local di Kabupaten Mamuju yang dipedomani oleh masyarakat yang menjadi perekat dalam terciptanya kerukunan umat beragama, diantaranya falsafah hidup masyarakat yaitu, *ampunna ni inung do uwai marandanna to mamunyu, to mamunyu mo ittu tau*. Artinya kalau sudah meminum air jernihnya orang Mamuju, maka telah menjadi orang Mamuju (Muis, dalam Kadir, 2013:21). Hal ini mengandung makna, orang Mamuju sangat terbuka terhadap orang pendatang. Masyarakat yang terbuka itu tetap saja memegang teguh adat yang kemudian menjadi perekat dari heterogenitas yang ada.

Di dalam masyarakat mandar juga dikenal dengan konsep “*malaqbiq*”. Konsep *malaqbiq* merupakan pranata sosial yang mengatur hubungan antar generasi dan kelompok struktur social dengan pendekatan kemanusiaan(Idham dan Saprillah, 2013:179). Adagium *pakalaqbiqi to tondo daiq mu, pakarajai sippatammu, asayanni to tondo naungmu* adalah konsep relasi antar manusia yang berbasis penghargaan kemanusiaan dengan menempatkan seseorang pada tempatnya.

Terpeliharanya kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamuju, tidak terlepas juga peran organisasi masyarakat seperti FKUB, yang aktif berperan dalam mempertemukan tokoh-tokoh agama lintas agama, baik yang sifatnya insidental, maupun rutin. Misalnya acara do'a bersama yang dilaksanakan setiap akhir tahun yang melibatkan semua tokoh masyarakat lintas agama.

Menurut Mahyuddin, Ketua FKUB Kabupaten Mamuju, kegiatan yang dilakukan selama ini baru pada taraf tingkat elit, belum sampai pada tingkat akar rumput. Hal ini disebabkan karena terbentur masalah dana yang dianggarkan untuk operasional FKUB, masih sangat minim (Wawancara di Mamuju, 7 Oktober 2015). Padahal, menurut Agustinus, salah seorang tokoh agama Kristen, dan Kepala Penyelenggara Kristen Kemenag Kabupaten Mamuju, seharusnya kegiatan FKUB lebih memprioritaskan pada masyarakat bawah (akar rumput), karena pada masyarakat bawahlah yang kurang pengetahuannya tentang pemahaman pluralisme, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh provokator. Kalau pada tingkat elit tidak terlalu penting karena pengetahuan mereka sudah cukup, dan semuanya orang-orang pintar (Wawancara, 5 Oktober 2015, di Mamuju).

Peran Penyuluh Agama

Sebelum membahas tentang peran penyuluh agama di Kabupaten Mamuju, terlebih dahulu diuraikan tentang kondisi penyuluh agama yang ada. Seperti telah diketahui, ada lima agama yang berkembang di Kabupaten Mamuju, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dari lima agama tersebut, hanya tiga agama yang memiliki penyuluh agama, yakni Islam, Kristen, dan Katolik, dengan jumlah yang bervariasi. Untuk penyuluh agama Islam sebanyak 141 orang, terdiri atas penyuluh PNS sebanyak 18 orang, dan enam di antaranya CPNS yang terangkat pada 1 Oktober 2015, dan penyuluh honorer sebanyak 123 orang. Penyuluh agama Kristen sebanyak 25 orang, terdiri atas penyuluh PNS sebanyak 4 orang, yang kesemuanya berstatus CPNS, yang juga terangkat pada 1 Oktober 2015, dan penyuluh honorer sebanyak 21 orang yang berasal dari semua gereja denominasi. Kemudian penyuluh agama Katolik sebanyak dua orang, yang semuanya berstatus penyuluh PNS.

Penyuluh agama PNS pada umumnya terangkat menjadi penyuluh PNS, setelah mengabdikan menjadi penyuluh agama honorer masing-masing kurang lebih selama 10 tahun, bahkan ada yang mencapai 20 tahun. Sebagai contoh Namru Asdar, yang mengabdikan sebagai penyuluh agama honorer sejak tahun 2001 sampai tahun 2010. Kemudian, Zainuddin tingkat pendidikan SMA, yang diangkat menjadi penyuluh agama dengan pangkat penyuluh agama penyelia. Menjadi penyuluh honorer selama 20 tahun, dan pada 1 Oktober 2015 yang lalu diangkat menjadi PNS berdasarkan jatah honorer K2.

Penyuluh agama yang ada tergabung dalam satu wadah organisasi yang disebut Kelompok penyuluh (Pokjaluh) yang anggotanya adalah penyuluh PNS. Saat ini,

yang tergabung dalam Pokjaluh semuanya adalah penyuluh PNS agama Islam, yang diketuai Namru Asdar, sekertaris Syamsu Alam. Kelompok penyuluh agama ini secara rutin melakukan rapat koordinasi pada setiap Kamis. Menurut Namru Asdar, rapat koordinasi antar penyuluh dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melakukan penyuluhan.

Lalu, bagaimana peran penyuluh agama dalam meningkatkan kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Mamuju? Dalam silabus materi kepenyuluhan yang telah disusun oleh Kementerian agama, tidak ada materi yang jelas yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Namun demikian, sebagian penyuluh agama tetap mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama, yang disampaikan dalam setiap melakukan penyuluhan di kelompok Majelis Taklim maupun kegiatan Khutbah Jum'at, khususnya menjelang hari Natal, seperti yang dilakukan Namru Asdar, salah seorang penyuluh agama Islam, yang mengemukakan sebagai berikut:

“Kami tetap berusaha memberikan pemahaman kepada umat bagaimana sebenarnya konsep agama kita (Islam) berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dengan berbagai macam penganut agama di antara kita. Ajaran Islam untuk tidak membatasi diri untuk berbuat kebaikan, berlaku adil untuk orang lain, artinya bukan karena bencinya kita kepada suatu golongan untuk berlaku tidak adil. Hal inilah yang perlu dipahami, karena salah satu faktor terjadinya konflik karena umat itu sendiri tidak memahami ajaran agamanya sendiri. Bagaimana konsep ajaran agama untuk menciptakan kerukunan. Tidak ada satu agama yang memerintahkan saling menyerang satu agama dengan agama lain (Wawancara di Mamuju, 29 September 2015).

Penyuluh agama lainnya yang aktif mendorong terciptanya kerukunan umat beragama adalah Pendeta Armstrong Pangelo, yang juga terangkat jadi penyuluh PNS pada

1 Oktober 2015, setelah sebelumnya menjadi penyuluh agama honorer sejak 2005. Armstrong adalah penyuluh agama Kristen dari Gereja Toraja Mamasa. Ia mengaku selama ini selalu menjalin hubungan yang baik dengan tokoh agama lainnya, baik dalam interen yang berbeda aliran atau gereja, maupun tokoh lintas agama. Dalam melakukan penyuluhan agama di kalangan umatnya, ia selalu memberikan pemahaman tentang paham pluralism. Visi kerukunan juga ditunjukkan oleh Pendeta Armstrong dengan melakukan penyuluhan agama, bukan hanya di Gereja Kristen Toraja Mamasa, tetapi juga di Gereja Kristen Oukimene.

Peran untuk meningkatkan kerukunan umat beragama bagi setiap penyuluh agama di Kabupaten Mamuju, juga merupakan penekanan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju dalam melakukan kegiatan penyuluhan kepada kelompok binaannya. Ada tiga hal, menurut Adnan Nota, yang harus diperhatikan oleh setiap penyuluh yakni, menjaga kerukunan intra, antarumat beragama, kalau intra jangan menyinggung persoalan khilafiyah, jangan mengangkat sebuah fiqhi berkaitan khilafiyah apalagi menyangkut hubungan antarumat beragama, jadi persoalan pluralitas ditonjolkan. Kemudian, bagaimana membantu pemerintah dalam persolan pembangunan, mendorong masyarakat untuk merespon pembangunan yang lebih besar (Wawancara di Mamuju, 7 Oktober 2015).

PENUTUP

Penduduk Kabupaten Mamuju adalah masyarakat heterogen dari suku bangsa dan penganut agama. Dari segi suku bangsa, selain Mandar yang merupakan penduduk asli, juga terdapat suku bangsa lainnya, di antaranya, Bugis, Makassar, Toraja, dan Jawa. Kemudian, dari segi penganut agama,

Abd. Kadir

terdapat lima agama yang berkembang, dengan jumlah penganut agama yang bervariasi. Dari lima agama tersebut, penganut Islam yang jumlahnya paling banyak, 87,94%.

Meskipun penduduk Kabupaten Mamuju heterogen, kerukunan antarumat beragama tetap terjaga. Relasi di antara mereka harmonis. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh adanya prana sosial yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat, peran pemerintah, dan organisasi masyarakat utamanya FKUB yang selalu mengadakan kegiatan yang mempertemukan tokoh masyarakat, dan tokoh agama lintas agama, yang mendorong terciptanya kerukunan umat beragama. Dan, tidak kalah pentingnya juga adalah peran penyuluh agama dalam mendorong terciptanya kerukunan antarumat beragama yang dilakukan dalam setiap kegiatan kepenyuluhan, maupun kegiatan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M, 1999, *Strategi dan Sinergi Kepenyuluhan Agama*, Intermedia, Jakarta.
- Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Depag RI, 2003, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*.
- BPS, 2014, Kabupaten Mamuju Dalam Angka Tahun 2014.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2000, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*.
- Efendi, Bachtiar, 2000, *Islam dan Negara*, Paramadina, Jakarta.
- Harahap, Syahrin, 2011, *Teologi Kerukunan*, Prenada Media, Jakarta.
- Ismail, Faisal, 2012, Republik Bhinneka Tunggal Ika: *Mengurai Isu-Isu Konflik, Multikulturalisme, Agama, dan Sosial Budaya*, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Idham, DR, M.Pd, Sapriillah, M.Si, 2013, *Malaqbiq Identitas Orang Mandar*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta.
- Kadir, Abd, 2013, *Laporan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mamuju*, Belum Diterbitkan, Balai Litbang Agama Makassar 2013, Makassar.
- Mudzhar, Atho, 2009, *Pengembangan Jaringan Riset dalam Rangka Penguatan Peran Agama dalam Pembangunan Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:574 Tahun 1999 dan Nomor 178 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya.
- Tim Penelitian Balai Litbang Agama Makassar, 2010, *Penyelenggaraan Kepenyuluhan Agama Islam di Kawasan Timur Indonesia*, Makassar, Balai Litbang Agama Makassar.
- , 2008, *Optimalisasi Pelayanan Keagamaan Departemen Agama*, Balai Litbang Agama Makassar, Makassar.
- , 2011, *Peran Kementerian Agama dalam Pembinaan Muallaf di Kawasan Timur Indonesia*, Balai Litbang Agama Makassar, Makassar.
- , 2012, *Dakwah Keagamaan di Daerah Terpencil*, Balai Litbang Agama Makassar, Makassar.